

Judul : Majukan industri AMDK, legislator: permudah pengurusan sertifikat
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Majukan Industri AMDK

Legislator: Permudah Pengurusan Sertifikat

ANGGOTA Komisi VII DPR Nila Yani Hardiyanti menyoroti persoalan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak hanya soal kepatuhan terhadap standar mutu produk. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan kebijakan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan bagi industri kecil.

Nila menjelaskan, pengelolaan sumber air yang tidak berkelanjutan, penggunaan kemasan plastik tidak terkontrol, serta lemahnya pengawasan distribusi berpotensi menimbulkan risiko ekologis dan ancaman kesehatan masyarakat. Risiko ini juga bertambah dengan menjamurnya industri AMDK skala kecil di daerah.

Perusahaan AMDK, sambung Nila, perlu secara transparan dan terukur memberikan responsibilitas pada bidang sosial dan lingkungan. Pasalnya, industri ini memberikan dampak masif akibat eksploitasi air tanah yang bisa memicu kekeringan dan krisis air bersih. "Harus ada kepatuhan dan prinsip keberlanjutan secara konkret dari perusahaan AMDK pada isu lingkungan," ucapnya.

Nila mengungkap, industri

kecil sebenarnya ingin mematuhi aturan, namun sering terhambat oleh biaya sertifikasi, keterbatasan akses laboratorium, dan SDM. Regulasi yang terlalu ketat justru memberi keuntungan bagi perusahaan besar, sementara usaha kecil kesulitan memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan yang sama.

Dalam kondisi ini, kata Nila, ada tiga isu krusial yang perlu jadi perhatian Pemerintah. Pertama, desain kebijakan sertifikasi harus mempertimbangkan skala usaha agar tidak membebani industri kecil. Kedua, penerapan kebijakan lingkungan, termasuk penggunaan kemasan ramah lingkungan, harus dilakukan bertahap dan realistis.

"Kita tidak bisa memaksakan standar lingkungan kelas global, sementara bahan baku, teknologi, dan ekosistem industrinya belum tersedia secara merata di dalam negeri terutama di daerah," tuturnya.

Ketiga, negara diminta hadir tidak hanya dalam hal administratif, tapi juga mendampingi secara teknis dan memfasilitasi akses agar industri kecil



Nilai Yani Hardiyanti

berkembang. Di sini, keberpihakan Pemerintah diuji, apakah kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi lingkungan dan konsumen, sekaligus memastikan usaha rakyat tetap hidup dan bertumbuh.

Dia menegaskan, keberhasilan kebijakan AMDK harus diukur dari pertumbuhan industri kecil yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, serta akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Industri boleh maju, regulasi harus kuat, tapi keadilan dan keberpihakan kepada usaha rakyat tidak boleh dikorbankan.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi mengingatkan agar Pemerintah konsisten dalam penerapan regulasi. Perubahan yang terlalu sering berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan bisa menghambat iklim investasi serta pertumbuhan industri AMDK yang bersifat jangka panjang.

"Regulasi itu penting, baik untuk konsumen maupun pelaku. Tapi, kalau Standar Nasional Indonesia (SNI) sering berubah hanya dalam hitungan dua atau tiga tahun, justru timbul ketidakpastian," ujar Erna.

Dia mencatat, SNI AMDK mengalami beberapa kali perubahan dalam kurun waktu relatif singkat, mulai dari tahun 2012, 2016, 2019, hingga 2024. Kondisi itu tidak sejalan dengan karakter industri AMDK yang memerlukan perencanaan dan investasi jangka panjang hingga 15-20 tahun ke depan.

"Industri AMDK ini bukan industri jangka pendek. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, bukan justru membuat aturan yang terus berubah," tegasnya.

Seiring dengan konsistensi regulasi, Erna juga mendorong pentingnya kemudahan dalam proses pengurusan SNI. Pasalnya, selama ini ada banyak keluhan dari pelaku industri terkait biaya pengurusan yang mahal, prosedur yang berbelit, serta waktu pengajuan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun.

"Birokrasinya panjang, padahal negara juga berkepentingan memastikan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat," ungkap legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Kendati demikian, kemudahan berusaha tidak boleh mengorbankan kualitas dan standar mutu. Untuk hal ini, Pemerintah bisa merancang mekanisme pengawasan dan sertifikasi yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada pengembangan industri nasional.

"Kita mau industri tumbuh, masyarakat terlindungi, dan negara tetap menjalankan tanggung jawab. Karena itu, kedepan regulasi harus dirancang lebih matang, jangka panjang, dan tidak berubah-ubah," tandasnya. ■ **PYB**